

ABSTRAK

Undang-Undang KUP tidak mengatur tentang pidana pengganti pidana denda. Apabila mengacu pada Pasal 30 KUHP, jika terpidana tidak membayar sama sekali uang denda, maka wajib menggantinya dengan menjalani pidana kurungan. Tujuan Penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan belum berkeadilan, untuk memahami dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan belum berbasis keadilan dan merekonstruksi regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan berbasis nilai keadilan. Metode penelitian dengan paradigma konstruktivisme, metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan sumber data sekunder, analisis deskriptif kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) setelah jangka waktu dipidana karena tidak dapat membayar pidana denda menjadi sangat sulit dilakukan eksekusi, sehingga menjadi tunggakan secara terus menerus oleh Jaksa Eksekutor. Undang-Undang KUP tidak mengatur secara *limitatif*, sehingga Pidana Denda tidak dapat dieksekusi. Kelemahan Struktur Hukum, bahwa sesuai dengan kewenangan Jaksa sebagai eksekutor, jika terpidana (Wajib Pajak) tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan subsidiair pidana penjara. Akan tetapi jika subsidiair pidana penjara tersebut tidak secara tegas dimuat dalam tuntutan/ putusan pengadilan, oleh sebab itu tidak secara otomatis dapat dilaksanakan oleh Jaksa. Kelemahan Substansi, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang KUP tidak mengatur tentang pidana pengganti pidana denda. Apabila mengacu pada Pasal 30 KUHP, jika terpidana tidak membayar sama sekali uang denda, maka wajib menggantinya dengan menjalani pidana kurungan. Kelemahan Kultur Hukum, bahwa dalam Undang-Undang KUP sampai saat ini regulasinya belum dapat membuat efek jera dan belum dapat memaksimalkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Kelemahan regulasi Undang-Undang KUP menjadi celah hukum bagi wajib pajak yang membandel / pengemplang pajak yang dengan kesengajaan. Rekonstruksi nilai dengan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana perpajakan, selain itu juga dapat mengoptimalkan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan. Rekonstruksi Regulasi, dengan merekonstruksi Undang-Undang KUP yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 supaya berkeadilan dengan menambah regulasi baru yang tercantum dalam Pasal 41 D. Temuan gagasan baru berdasarkan rumusan makna yang dihasilkan adalah "Sanksi Pidana Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan".

Kata Kunci: Tindak Pidana Perpajakan, Sanksi Pidana, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

The Taxation Law does not regulate criminal penalties in lieu of fines. If it refers to Article 30 of the Criminal Code, if the convict does not pay the fine at all, then he is obliged to replace it by serving imprisonment. The purpose of the study is to understand and analyze the regulation of criminal penalties in the field of taxation that is not yet fair, to understand and analyze the weaknesses of the regulation of criminal penalties in the field of taxation that is not based on justice and to reconstruct the regulation of criminal penalties in the field of taxation based on the value of justice. Research method with constructivism paradigm, sociological juridical approach method, primary data source and secondary data source, qualitative descriptive analysis. The findings show that based on a court decision that has permanent legal force (Inkracht van gewijsde) after a period of being sentenced for not being able to pay a criminal fine, it is very difficult to carry out executions, so that it becomes continuous arrears by the Executing Prosecutor. The Tax Law does not regulate in a limited manner, so that the Penalty of Fines cannot be executed. Weaknesses of the Legal Structure, that in accordance with the authority of the Prosecutor as the executor, if the convict (Taxpayer) does not pay a fine, it will be replaced with a subsidiary to imprisonment. However, if the subsidiary imprisonment is not explicitly stated in the court's demands/decision, therefore it cannot automatically be carried out by the Prosecutor. Substance Weaknesses, that as in the Taxation Law does not regulate criminal penalties in lieu of fines. If it refers to Article 30 of the Criminal Code, if the convict does not pay the fine at all, then he is obliged to replace it by serving imprisonment. Weaknesses in Legal Culture, that in the Taxation Law, up to now the regulations have not been able to create a deterrent effect and have not been able to maximize state revenues in the taxation sector. The weakness of the Tax Law regulation is a legal loophole for stubborn taxpayers / tax evaders who intentionally. Value reconstruction by providing a deterrent effect on perpetrators of tax crimes, besides that it can also optimize state treasury revenues from the tax sector. Reconstruction of Regulations, by reconstructing the Taxation Law which was last revised by Law Number 16 of 2009 so that it is fair by adding new regulations listed in Article 41 D. Finding new ideas based on the formulation of the resulting meaning is "Criminal Tax Sanctions Based on Justice Values" .

Keywords: *Tax Crimes, Criminal Sanctions, Value of Justice.*